
**MANAJEMEN SISTEM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH
UNIVERSAL MENUJU WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DR. MUHAMMAD SAHNAN, M.Pd.

Dosen/Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: msahnun772@gmail.com

ABSTRACT

Management emphasis on the human aspect as actors and policy implementers. In accordance with the concept of management, that person's success or failure depends on the leadership of the extent to which he succeeded in managing the human resources that exist on organisation. Existing human resources should be managed effectively and be able to work together. Specifically examines the efforts of management in conjunction with management functions, can be implemented, especially in practices relating to the planning, implementation, and supervision. The results showed bring: (1) planning development program Universal Intermediate Education towards compulsory education 12 years in the South Coastal District of West Sumatra, beginning with the formulation of the vision and mission, requirements analysis, and preparation of planning, (2) the implementation of development programs towards reasonable Universal Intermediate Education compulsory education 12 years in the District South coast of West Sumatra has a procedure, namely organizing, parties involved in the development of intermediate education programs, identify the source of funds in the implementation of development programs and determining technique toward reasonable Universal Intermediate Education compulsory education 12 years, (3) Monitoring the Development Programme Universal Intermediate Education headed compulsory education 12 years in Coastal District South West Sumatra include monitoring and evaluation, and (4) Model Development System Management Universal Intermediate Education to the compulsory education 12 years on the South Coast, applying the principles of management, including planning, implementation, monitoring. In formulating planning beforehand adapt to change and analyze the needs doing SWOT analysis involving stakeholders (interested parties). In practice always forward commitment, cooperation, and team work is solid. Supervision is carried out through monitoring and evaluation.

Keywords: *management, universal intermediate education, compulsory education 12 years.*

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan konsep manajemen bahwa sukses tidaknya seorang pimpinan itu sangat tergantung pada sejauh mana dia berhasil mengelola sumber

daya manusia yang ada pada organisasinya. William B. Castetter (1996:5) menambahkan, fungsi-fungsi yang lebih spesifik lagi meliputi perencanaan sumber daya manusia, penerimaan personel

baru, penyaringan, orientasi dalam membantu personel menyesuaikan diri secara efektif terhadap tugas baru, penilaian, pengembangan dan kompensasi.

Ketujuh fungsi manajemen tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, karena ketujuh fungsi manajemen tersebut sudah tercakup pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan itu. Hal ini seperti diungkapkan Engkoswara (2003:2) bahwa fungsi utama perilaku berorganisasi dalam bidang pendidikan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan.

Di antara fungsi-fungsi manajemen pengembangan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, maka fungsi pengembangan pendidikan menengah merupakan hal yang sangat penting dan mutlak dilakukan. Sebagaimana dikemukakan Siagian (2004:182) bahwa untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang dan terutama untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan sumber daya manusia (pendidikan menengah universal) merupakan keharusan mutlak.

Menurut Khairul Amri Notodiputro (2012), Pendidikan Menengah Universal merupakan program yang ditujukan untuk perluasan akses masyarakat

terhadap pendidikan menengah dan akselerasi APK (Angka Partisipasi Kependidikan) pendidikan menengah. Untuk meningkatkan akses tersebut, pendidikan menengah universal memerlukan strategi dan modalitas yang memadai. Pendidikan menengah universal juga merupakan program antisipasi untuk menyambut bonus demografi Indonesia yang terjadi dari tahun 2010-2030 mendatang. Melalui pendidikan menengah universal, kualitas kerja di Indonesia akan meningkat. Minimal tenaga kerja yang masih banyak tamat SLTP bergeser menjadi lulusan SLTA.

Senada dengan itu, menurut Hamid Muhammad (2012), Pendidikan Menengah Universal memiliki manfaat lain yang signifikan. Program wajib belajar 9 tahun yang telah berhasil dilaksanakan memiliki konsekuensi logis menimbulkan pengangguran atau tenaga kerja muda baru, jika tidak dilanjutkan ke jenjang berikutnya, karena adanya wajib belajar memberikan korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendapatan, dan daya saing bangsa.

Penelitian ini secara umum difokuskan pada pencarian manajemen sistem pengembangan pendidikan mene-

ngah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimanakah manajemen sistem pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan?”

Pertama, peneliti berupaya untuk memotret perencanaan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam menjawab pertanyaan itu adalah: (1) Bagaimanakah visi dan misi program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimanakah analisis kebutuhan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimanakah menyusun perencanaan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan?

Kedua, bagaimanakah pelaksanaan program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? Dalam hal

ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam menjawab pertanyaan itu adalah: (1) Bagaimanakah pengorganisasian program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Siapakah yang bertanggung jawab dalam program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimanakah prosedur program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (4) Dari manakah sumber dana program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (5) Bagaimanakah teknik pelaksanaan program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan?

Ketiga, bagaimanakah pengawasan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? Untuk menjawab ini dikembangkan beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah monitoring program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimana-

kah evaluasi program pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan?

Keempat, bagaimanakah model manajemen sistem pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan?

B. METODE PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode deskriptif, dan analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu masalah yang dibahas dengan cara memaparkan, menafsirkan, menulis objek yang diteliti melalui kegiatan mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, kemudian dianalisis serta diambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang hendak dicari akan menggambarkan situasi sosial manajemen sistem pengembangan pendidikan menengah universal di Kabupaten Pesisir Selatan dalam usaha mencapai tujuannya. Situasi sosial sebagaimana diungkapkan oleh Spradley (dalam Sahnan, 2003:222) terdiri dari unsur-

unsur: (a) adanya aktor, (b) adanya tempat, dan (c) adanya interaksi antara sesama aktor dan tempat. Dalam pengembangan pendidikan menengah universal ini, unsur manusia dengan segala tingkah lakunya memegang peranan penting. Proses pelaksanaan pengembangan pendidikan menengah universal akan dapat diketahui melalui pengamatan atas interaksi-interaksi yang terjadi antara orang-orang yang terkait dengan pengembangan pendidikan menengah universal. Gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang situasi sosial hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang berulang-ulang dan langsung.

Nasution (dalam Sahnan, 2003: 227) mengemukakan bahwa manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam menjaring data dan informasi dengan menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi dan wawancara.

Bogdan dan Biklen (dalam Sahnan, 2003:228) mengemukakan bahwa keberhasilan penelitian naturalistik sangat ditentukan oleh ketelitian, kelengkapan catatan lapangan (*field note*) yang disusun peneliti. Catatan lapangan di-

susun berdasarkan hasil pengamatan (observasi), wawancara secara mendalam (*deep interview*), dan studi dokumenter.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipan, dan (3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut diorganisir, ditafsirkan dan dianalisis secara berulang-ulang guna menyusun konsep dan abstraksi temuan lapangan. Kredibilitas data dicek dengan prosedur triangulasi, pengecekan anggota, diskusi teman sejawat, dan pengecekan mengenai kecukupan referensi. Sedangkan dependabilitas dan konformabilitas ditempuh melalui pengauditan oleh para pembimbing, dianalisis secara berulang-ulang guna menyusun konsep dan abstraksi temuan lapangan.

2. Teknik Analisis Data

Moleong (2005:103) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Dengan demikian analisis data adalah pengorganisasian data, mengurutkan data dan membentuknya ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar

untuk pemberian makna atau pemahaman.

3. Tahap-tahap Penelitian

Dari uraian di atas, penulis membuat suatu kesimpulan tentang tahap-tahap penelitian yang penulis lakukan yang terdiri dari lima tahap, yaitu tahap orientasi, eksplorasi, *member check*, analisis data dan laporan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Program

Visi dan misi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan bisa dijabarkan berikut ini. Berdasarkan wawancara pada 2 Agustus 2013 dengan kepala Dinas Pendidikan, sekretaris Dinas Pendidikan, kepala bidang (Kabid) Pendidikan SMA/SMK dan staf Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang visi dan misi pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, diketahui bahwa:

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan adalah: "Terselenggaranya layanan prima pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk insan cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia secara komprehensif."

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ke depan sebagaimana yang tertuang dalam visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan layanan prima pendidikan di setiap satuan pendidikan
- b. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik
- c. Mengintegrasikan proses pembelajaran intelektual, emosional dan spiritual
- d. Memasyarakatkan budaya demokratis, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri tenaga pendidik dan peserta didik
- e. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang responsif, adil dan merata.
- f. Meningkatkan kompetensi guru untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan pembelajaran
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang berwawasan dan bermutu
- h. Melaksanakan proses pembelajaran yang bernuansa surau.

2. Analisis Kebutuhan Program

Berdasarkan wawancara pada 2 Agustus 2013 dengan kepala Dinas Pendidikan, sekretaris Dinas Pendidikan, kepala bidang (Kabid) Pendidikan SMA/SMK dan staf Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang analisis kebutuhan di Kabupaten Pesisir Selatan, diketahui bahwa:

Dalam melaksanakan analisis kebutuhan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Peluang (*opportunities*):
 - a) Letak geografis yang strategis; menempati sebelah utara berbatasan dengan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, dan sebelah barat dengan Samudera Hindia.
 - b) Aksesibilitas transportasi yang baik; angkutan transpor darat yang lancar dan tersedianya 3 buah pelabuhan antarpulau.
 - c) Dukungan masyarakat dan perguruan tinggi.
 - d) Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi.
 - e) Dukungan Pemerintah Kabupaten

- Pesisir Selatan cukup besar dengan menjadikan sektor pendidikan sebagai skala prioritas pembangunan. f) Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dalam proses PBM. g) Tingginya minat masyarakat mengikuti pendidikan
- 2) Ancaman (*treaths*): a) Banyaknya sarana prasarana sekolah yang rusak akibat gempa 30 September 2009. b) Lambatnya pelaksanaan rehabilitasi terhadap sarana prasarana sekolah akibat gempa. c) Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, penyalahgunaan internet lainnya. d) Melemahnya kepercayaan pasar terhadap mutu keluaran pendidikan. e) Rawannya peredaran narkoba dan minuman keras yang dapat merambah dan mempengaruhi anak usia sekolah sehingga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. f) Kemungkinan akan munculnya ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kaidah agama.
- 3) Kekuatan (*strengths*): a) Dukungan masyarakat perantau terhadap pendidikan cukup tinggi. b) Mulai dilirikinya Kabupaten Pesisir Selatan oleh pihak NGO asing dalam memberikan bantuan sarana prasarana pendidikan. c) Motivasi guru untuk meningkatkan kualifikasi cukup tinggi. d) Jumlah guru yang telah tersertifikasi semakin meningkat. e) Tersedianya pedoman pembelajaran berupa KTSP pada semua jenjang pendidikan. f) Terbentuknya Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) baik tingkat kabupaten maupun tingkat satuan pendidikan.
- 4) Kelemahan (*weaknesses*): a) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sekolah. b) Komite Sekolah belum berfungsi dan berperan secara maksimal. c) Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) belum optimal. d) Sarana belajar beberapa sekolah belum memenuhi SPM sesuai Standar Nasional Pendidikan. e) Distribusi penyebaran guru yang belum merata. e) Masih banyaknya guru yang belum memenuhi standar kualifikasi dan rendahnya kompetensi guru. f) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan belum terprogram dan terlaksana dengan baik.

Setelah dilakukan analisis SWOT, selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun, seperti berikut ini:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana

Seiring dengan telah dicanangkannya oleh gubernur Sumatera Barat tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun pada 17 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memutuskan untuk meningkatkan wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Hal ini dengan dasar pertimbangan bahwa untuk tahun pelajaran 2009/2010, APK tingkat SD sudah mencapai APK 124,32%, sedangkan APK tingkat SMP/MTs 97,21%, dan APK tingkat SMA/MA/SMK adalah 72,11%; dan masih banyak siswa yang tidak melanjutkan ke SLTA akibat ekonomi lemah.

Dampak dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh gubernur Sumatera Barat pada 17 Juni 2009 telah dapat meningkatkan daya tampung di tingkat SLTA pada tahun pelajaran 2009/2010 dari 17.982 siswa meningkat menjadi 19.536 siswa (meningkat 1.554 siswa). Khusus untuk penerimaan siswa baru tingkat SLTA tahun pelajaran 2009/2010, lulusan

SMP/MTs sejumlah 6.649 siswa, tertampung sebanyak 6.318 siswa di SLTA (95,02%). Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, maka penerimaan siswa baru di tingkat SLTA terdapat peningkatan sebesar 10%. Hal ini terlihat dari lulusan siswa tingkat SLTP tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 5.628 siswa dan tertampung di SLTA sebanyak 4.829 siswa. Fenomena ini sangat berpengaruh terhadap APK tingkat SLTA yang pada tahun pelajaran 2007/2008 sebesar 61,53% meningkat menjadi 69,92% pada tahun pelajaran 2009/2010, dan tahun pelajaran 2009/2010 APK SLTA meningkat menjadi 72,11%.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (berupa wajib belajar 12 tahun) mewajibkan anak memiliki pendidikan dasar sampai SMA sederajat. Guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan setiap tahunnya anggaran untuk pendidikan terutama untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, seperti telah meningkatnya ketersediaan ruang kelas yang memadai

dan sarana pendukung lainnya, yang telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya serap siswa yang ditandai dengan peningkatan APK pada lima tahun pelajaran terakhir. APK SD pada tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 102,00% dan lima tahun kemudian pada tahun pelajaran 2009/2010 meningkat menjadi 124,32%, dan untuk tingkat SMP pada tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 92,20% menjadi 97,21% pada tahun pelajaran 2009/2010, selanjutnya untuk tingkat SMA pada tahun pelajaran 2005/2006 sebesar 58,52% menjadi 72,11% pada tahun pelajaran 2009/2010.

Dari kondisi APK yang cukup tinggi tersebut, ternyata masih banyak anak usia SD, SMP dan SMA yang masih belum dapat menikmati pendidikan karena putus sekolah. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun pelajaran 2009/2010, diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi, yakni sebesar 293 orang, tersebar di tiga kecamatan. Angka putus sekolah yang paling besar terdapat di Kecamatan Pancung Soal dengan jumlah 52 orang, kemudian di Kecamatan IV Jurai sebesar 42 orang, dan di Kecamatan Sutera

sebesar 41 orang. Jika angka putus sekolah ini dicermati kembali, ternyata semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin tinggi pula angka putus sekolah. Namun angka putus sekolah yang paling besar berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK, yakni sebesar 102 orang, kemudian jenjang SMP sebesar 96 orang, dan jenjang SD sebesar 90 orang. Alasan mendasar anak siswa sekolah ini mengalami putus sekolah sebagian besar di antaranya karena tidak mampu atau ekonomi, kemudian karena faktor lingkungan, tidak ada motivasi untuk sekolah, alasan bekerja, kawin, dan lainnya.

b. Partisipasi masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan bersubsidi untuk pendidikan menengah 12 tahun (wajib belajar 12 tahun) melalui Program Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Program Pendidikan Bersubsidi Kabupaten Pesisir Selatan, pada satu sisi dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan tidak ada lagi tamatan SLTP yang tidak tertampung pada jenjang pendidikan SLTA. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menjadi bagian yang bersifat negatif terhadap partisipasi (peran serta) masya-

rakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan bersubsidi, akan mengakibatkan berkurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa dengan adanya program pendidikan bersubsidi, maka tidak ada lagi tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua dan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun sumber dana untuk pelaksanaan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari berbagai hal, yaitu:

a. Pemerintah (APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sejak dicanangkannya wajib belajar 12 tahun pada 17 Juni 2009, mengalokasikan anggaran BOSDA terhitung mulai 1 Juli 2009 untuk sekolah menengah, dengan indeks SMA/MA Rp 35.000./siswa/bulan, SMK 40.000./sis-

wa/bulan. Karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, baik pusat, provinsi dan kabupaten, maka orangtua siswa masih diminta untuk berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan, tetapi setiap siswa miskin dibebaskan dari segala pungutan (gratis). Terlebih lagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat sejak 1 Juli 2013 yang memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat sekolah menengah dengan indeks Rp 1.000.000./siswa/tahun, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pendidikan gratis bagi sekolah menengah (untuk pendidikan dasar, pendidikan gratis telah terlaksana sejak 1 Juli 2005).

b. Orangtua siswa dan masyarakat

Biaya yang dipungut dari orangtua siswa berkisar Rp 20.000 sampai Rp 50.000 terhitung sejak 1 Juli 2009 (sejak dicanangkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan). Tetapi siswa miskin dibebaskan dari segala biaya, dengan memberikan beasiswa siswa miskin yang diperuntukkan untuk membiayai sekolahnya. Sejak 1 Juli 2013 dengan adanya BOS (pemerintah pusat) Rp 1.000.000/siswa/tahun untuk sekolah menengah, maka di

Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan kebijakan pendidikan gratis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan diawali dengan perumusan visi dan misi, analisis kebutuhan, dan penyusunan perencanaan.
- b. Pelaksanaan program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki prosedur, yaitu pengorganisasian pihak yang terlibat dalam program pengembangan pendidikan menengah, mengidentifikasi sumber dana dalam pelaksanaan, serta menerapkan teknik program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun.
- c. Pengawasan dalam program pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi monitoring dan evaluasi.

- d. Model manajemen sistem pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam merumuskan perencanaan terlebih dahulu mengadaptasi perubahan (*changes*) dan menganalisis kebutuhan dengan melakukan analisis SWOT melalui upaya pelibatan *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan). Dalam pelaksanaannya selalu mengedepankan komitmen, kerja sama, dan tim kerja yang solid. Pengawasan dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

2. Saran

Berdasarkan penelitian pengembangan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan ini, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam percepatan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun dituntut adanya komitmen, *team work* yang solid dan kerja sama, oleh karena itu perlu menjadi perhatian bagi para pe-

- ngambil kebijakan, penyelenggara pendidikan dan masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi para pengambil kebijakan dan penyelenggara pendidikan terutama dalam percepatan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun.
 - c. Percepatan pendidikan menengah universal menuju wajib belajar 12 tahun seyogyanya menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
 - d. Kepada pihak lain yang ingin melanjutkan penelitian atau memaknai, disarankan untuk menggunakan waktu yang lebih lama di lapangan sehingga hasil penelitian diperoleh dengan maksimal.
 - e. Penelitian kualitatif akan lebih sempurna jika dilakukan dengan *participat observation* (observasi partisipan) dengan waktu yang lebih lama sehingga bisa mengungkap makna di balik realitas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Castetter, William B. 1996. *The Human Resource Function in Educational Administration*. Ohio: Merrill an Imprint of Prentice Hall Englewood Clifft, New Jersey Columbus.
- Engkoswara. 2005. *Paradigma Manajemen Pendidikan dalam Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Hamid. 2012. *Pendidikan Menengah Universal*. Jakarta.
- Notodipuro, Khairul Amri. 2012. *Pendidikan Menengah Universal*. Jakarta.
- Sahnan, Muhammad. 2003. "Manajemen Sistem Pengembangan Tenaga Kependidikan." *Disertasi*. Bandung: PPs UPI Bandung.
- Sahnan, Muhammad. 2011. "Manajemen Sistem Pengembangan Tenaga Kependidikan." *Jurnal Pendidikan Murabbi*. Painan: STAI Painan.
- Sahnan, Muhammad. 2013. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah: Suatu Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Cerdas Proklamator* (Edisi I). Padang: Prodi PGSD FKIP Universitas Bung Hatta.

hz